

PENGUKURAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI KOTA MALANG TAHUN 2021

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Email: litbangkotamlg@gmail.com

Abstrak. Pengukuran Indikator Program Pembangunan Bidang Ekonomi Kota Malang bertujuan sebagai tolak ukur Pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan program baru yang terdapat dalam periode Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Adanya penyesuaian program dan target pada RPJMD Kota Malang terbaru, artinya dibutuhkan peta transisi program masing-masing urusan dari bentuk program yang lama ke program yang baru. Bidang ekonomi merupakan salah satu perwujudan misi Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang nomor 2 yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan. Pengukuran indikator program pembangunan bidang ekonomi meliputi pengukuran pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi serta evaluasi target dan capaian pembangunan pada urusan kegiatan ekonomi Kota Malang. Analisa yang digunakan ialah analisa indikator pembangunan ekonomi dan evaluasi target capaian program bidang ekonomi. Pada tahun 2020, terdapat sebesar 67% indikator program ekonomi yang telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas sangat tinggi oleh masing-masing perangkat daerah. Indikator tersebut telah diwujudkan dengan berbagai kegiatan dan realisasi yang telah melebihi target.

Kata Kunci: Ekonomi, Program pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

***Abstract.** Measurement the indicators of Malang City Economic Development Program aims abasic data for the Malang City Government for implementing new programs. These programs are contained in the Draft Regional Regulation on Amendments to the Malang City Medium-Term Development Plan 2018-2023. There are several program adjustments and targets in the latest Malang City Medium-Term Development Plan. So a program transition document is needed for each sector, including the economic sector from the old program to the new program. The economic sector is one of the manifestations of the mission of the Draft Regional Regulation of the Regional Medium-Term Development Plan of Malang City RPJMD number 2, namely Creating a Productive and Competitive City Based on Creative Economy, Sustainability and Integration. Measurement of indicators of economic development programs includes measuring economic growth, employment opportunities, and economic infrastructure as well as evaluating development targets and achievements in the affairs of the economic activity of the city of Malang. The analysis used is the analysis of economic development indicators and evaluation of program achievement targets in the economic sector. In 2020, there are 67% indicators of economic programs that have been implemented with a very high level of effectiveness by government service in Malang city. These indicators have been realized through various activities and realizations that have exceeded the target.*

Keywords: Economic, Development Program, Regional Medium Term Development Plan

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah wajib untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Peraturan pemerintah ini menjelaskan Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Untuk itu Bupati/Walikota mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupaten/Kota. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu,

evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 sudah dilengkapi dengan target dan proyeksi indikator kinerja daerah dari beberapa program untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Namun, sejak tahun 2020 ini, negara-negara di dunia sedang mengalami pandemi virus Corona (Covid-19), termasuk Indonesia. Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan, tetapi di berbagai aspek kehidupan salah satunya mengalami perlemahan dalam bidang ekonomi.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang terdampak dengan adanya wabah virus Corona (Covid-19). Oleh karenanya, Pemerintah Kota Malang perlu penyesuaian untuk menyikapi hal tersebut. Salah satunya dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Malang tahun 2018-2023. Tidak hanya itu, Perubahan RPJMD Kota Malang tahun 2018 berfokus pula untuk menyesuaikan dasar hukum ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, perubahan pada pembaharuan gambaran umum kondisi daerah, menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyelaraskan prioritas nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2025 dan perubahan RPJMN pada penyesuaian target indikator sasaran yang terdampak pandemi. Adanya perubahan tersebut menyebabkan beberapa program

pembangunan di Kota Malang yang mengalami penyesuaian pada beberapa target indikator kinerja, tujuan dan sasaran dimana salah satunya untuk bidang ekonomi. Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023 maka diperlukan dokumen yang berisi tentang pengukuran pencapaian indikator program yang baru terutama dalam bidang ekonomi agar tetap dapat merepresentasikan visi dan misi Kota Malang.

Tujuan Kegiatan Pengukuran Indikator Program Pembangunan Bidang Ekonomi ialah sebagai berikut:

1. Mengukur capaian indikator program pembangunan bidang ekonomi tahun 2021;
2. Menganalisis antara hasil capaian yang diperoleh pada tahun 2021 dengan target/sasaran yang telah ditetapkan;
3. Mengidentifikasi dan analisis faktor-faktor determinan yang mempengaruhi capaian indikator program pembangunan bidang ekonomi;
4. Memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang berdasarkan hasil penelitian.

2. Tinjauan Pustaka

a. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Indikator kinerja Perangkat Daerah, berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekadar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* kegiatan tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, pemerintah daerah akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan atau manfaat yang besar kepada masyarakat banyak.

b. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai (Mulyani et al, 2007):

- 1) Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat;
- 2) Perkembangan pendapatan per kapita dalam suatu masyarakat dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya dari yang masih bercorak tradisional ke modern.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Indeks

Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas

pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 pilar dan 8 sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif Berikut merupakan penjabaran dari setiap pilar indeks pembangunan ekonomi inklusif (inklusif.bappenas.go.id):

- 1) Pilar 1 Pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi;
- 2) Pilar 2 Pemerataan Pendapatan dan Penguangan Kemiskinan;
- 3) Pilar 3 Kemudahan Akses dan Kesempatan.

METODE

1. Metode Analisa Indikator Pembangunan Ekonomi

- a. Pertumbuhan PDRB riil per kapita
Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu.

$$\text{Pertumbuhan PDRB} = \frac{(Y_t - Y_{t-1})}{Y_{t-1}} \times 100$$

- b. *Share* Manufaktur terhadap PDRB
Share (besaran) sektor manufaktur terhadap PDB/PDRB adalah persentase porsi sektor manufaktur terhadap keseluruhan PDB/PDRB. Industri Manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang terkait dengan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi; dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya; dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan (*assembling*).

$$= \frac{\text{Share Manufaktur} \\ \text{PDRB Industri Pengolahan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$

c. Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal

Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal Rasio kredit perbankan terhadap PDB/PDRB dihitung dari total kredit terhadap total PDRB yang menunjukkan perbandingan antara total pemberian kredit terhadap produktivitas ekonomi. Rasio tersebut menilai seberapa besar angka pinjaman (kredit) atas total produksi di sebuah perekonomian.

$$\text{Rasio Kredit} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total PDB (PDRB)}}$$

d. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja Tingkat kesempatan kerja (TKK) menggambarkan peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

$$\text{Kesempatan Kerja} = \frac{\Sigma \text{penduduk bekerja}}{\Sigma \text{angkatan kerja}} \times 100\%$$

e. Persentase Penduduk Bekerja Penuh

Persentase Penduduk Bekerja Penuh Penduduk bekerja penuh adalah pekerja yang jumlah jam kerjanya dalam seminggu adalah lebih dari atau sama dengan 35 jam (≥ 35 jam). Pekerja penuh menunjukkan pekerjaan yang relatif lebih stabil serta memberikan paket tunjangan yang lebih baik bagi individu. Maka dengan jumlah jam kerja penuh, seseorang relatif lebih dapat menjamin penghidupannya untuk menjadi sejahtera.

$$= \frac{\text{Penduduk Kerja Penuh} \\ \Sigma \text{penduduk kerja} \geq 35 \text{ jam/mg}}{\Sigma \text{penduduk kerja}} \times 100\%$$

f. Persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah keatas

Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas secara umum menunjukkan kualitas pekerja yang relatif lebih baik. Pekerja dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memastikan jenis pekerjaan yang lebih profesional. Tingkat tenaga kerja yang berkualitas membuat tingkat inklusivitas ekonomi yang lebih tinggi, karena artinya akses dan kesempatan lebih bisa terserap oleh berbagai lapisan masyarakat.

$$= \frac{\text{Penduduk Berpendidikan} \\ \Sigma \text{tenaga kerja dg minimal SMA}}{\Sigma \text{penduduk bekerja}} \times 100\%$$

g. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik/PLN

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN adalah persentase rumah tangga yang di rumahnya sudah tersedia jaringan atau dapat mengakses listrik/PLN terhadap total rumah tangga secara keseluruhan. Aktivitas ekonomi berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah merata untuk semua masyarakat.

$$= \frac{\text{Elektrifikasi} \\ \Sigma \text{rumah tangga berakses listrik}}{\Sigma \text{rumah tangga}} \times 100\%$$

h. Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang

Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang diukur dari total panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap luas wilayah. Total panjang jalan dengan kondisi baik mencerminkan keterjangkauan infrastruktur jalan dan aktivitas ekonomi yang lebih lancar. Artinya pertumbuhan ekonomi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat.

$$= \frac{\text{Presentase Jalan Baik} \\ \Sigma \text{panjang jalan baik}}{\text{Total Luas Wilayah}} \times 100\%$$

i. Rasio Pendapatan Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini

berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna).

$$GR = 1 - \sum Pi(Fi + Fi - 1)ni = 1$$

Dimana:

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

Pi : Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fi : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dlm kelas pengeluaran ke-i

Fi-1 : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

2. Metode Evaluasi Target Capaian urusan Kegiatan Bidang Ekonomi

Dalam melakukan evaluasi target capaian tujuh belas urusan kegiatan analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif evaluatif. Langkah dalam melakukan analisa evaluasi target capaian urusan kegiatan bidang ekonomi ialah sebagai berikut:

- Memetakan program dan indikator program yang sama dengan program sebelumnya. Merupakan identifikasi awal untuk memetakan program dan indikator yang sama dengan periode sebelumnya pada 17 urusan program kegiatan ekonomi;
 - Mengklasifikasikan data & mentransformasikan ke dalam kertas kerja;
 - Evaluasi capaian program berdasarkan data target dan realisasi pada setiap indikator program;
- $$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
- Evaluasi efektifitas capaian indikator program dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun
1	Sangat Tinggi	91% - 100%
2	Tinggi	76% - 90%
3	Sedang	66% - 75%
4	Rendah	51% - 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2017

- Analisis faktor-faktor determinan akan dijelaskan secara deskriptif berupa faktor-faktor yang mempengaruhi nilai/skor pada Pengukuran Indikator Program Pembangunan Bidang Ekonomi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Perekonomian Kota Malang

Nilai PDRB Kota Malang atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 72,16 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami penurunan sebesar 0,61 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 72,77 triliun rupiah. Penurunan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh penurunan produksi pada sebagian besar lapangan usaha dan terdapat pengaruh inflasi.

Berdasarkan harga konstan angka PDRB juga mengalami penurunan, dari 52,34 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 51,15 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar -2,26 persen, menurun lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,73 persen. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh penurunan produksi pada sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

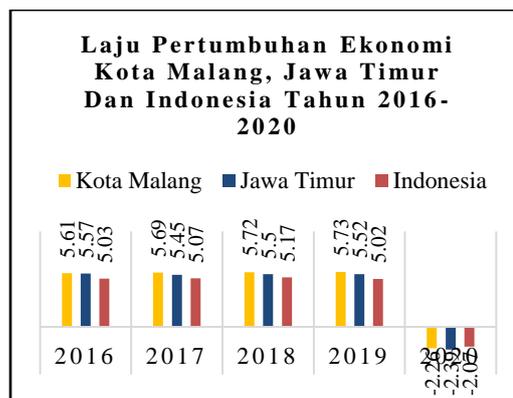
Ditinjau berdasarkan sektor lapangan usaha ekonomi, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada sektor jasa

perusahaan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan real estate. Untuk pada tahun 2019 potensi laju pertumbuhan ekonomi bergeser pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, penyediaan akomodasi dan makan minum, dan konstruksi. Selanjutnya pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi tertinggi ialah informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa pendidikan. Sedangkan sektor konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang pada tahun sebelumnya memiliki laju pertumbuhan tertinggi, pada tahun 2020 mengalami penurunan laju pertumbuhan ekonomi sebesar -0,63 dan -10,99. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan tajam. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan adalah sebesar 5,73%, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi minus 2,26%. Pertumbuhan ekonomi kota Malang mengalami penurunan dikarenakan dampak dari adanya pandemi covid-19.



Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Adanya pandemi covid-19 berdampak secara langsung pada sektor-sektor lapangan usaha perekonomian di kota-kota Indonesia, termasuk pula Kota Malang. Kota Malang memiliki pertumbuhan ekonomi minus 2,26 pada tahun 2020. Berikut merupakan laju pertumbuhan ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada tahun 2016-2020.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Malang dan sekitarnya

2. Analisa Indikator Pembangunan Ekonomi

a. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Pengukuran pertumbuhan ekonomi terdiri dari pertumbuhan riil per kapita, *share* manufaktur terhadap PDRB, dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB Nominal.

Tabel 2. Pengukuran Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan PDRB per kapita	Share Manufaktur	Rasio Kredit
2016	0%	25,40%	7,50%
2017	5%	25,22%	8,20%
2018	4%	25,47%	8,60%
2019	10%	25,73%	9,10%
2020	-8%	26,88%	9,40%

Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Malang mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 10%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami menurun menjadi -8%. Naik dan turunnya angka pertumbuhan PDRB per kapita dipengaruhi oleh PDRB atas dasar harga konstan Kota Malang. Saat ini Kota Malang memiliki laju pertumbuhan ekonomi sebesar -2,26. Sehingga jelas berpengaruh pada pertumbuhan PDRB per kapita Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena dampak dari adanya pandemi covid-19. Sedangkan pada tahun 2020 *share* manufaktur Kota Malang mengalami kenaikan menjadi 26,88%. Nilai ini cenderung naik dikarenakan adanya PDRB atas dasar harga berlaku Industri Pengolahan Kota

Malang yang juga terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Nilai yang terus meningkat setiap tahun dapat menjadi potensi yang dapat digunakan sebagai pengembangan trobosan pemulihan ekonomi Kota Malang dalam masa pandemi covid-19. Untuk rasio kredit Kota Malang mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 rasio kredit Kota Malang ialah 9,1% dan naik 0,3% pada tahun 2020 menjadi 9,4%.

b. Pengukuran Kesempatan Kerja

Pengukuran kesempatan kerja merupakan pilar kedua dari indeks pembangunan Indikator kesempatan kerja meliputi tingkat kesempatan kerja, Persentase penduduk berkerja penuh, dan Persentase tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke atas.

Tabel 3. Pengukuran Kesempatan Kerja

Tahun	Tingkat Kesempatan Kerja	Persentase Penduduk Berkerja Penuh	Tenaga Kerja berpendidikan
2015	93%	84%	63%
2016	93%	84%	63%
2017	93%	81%	61%
2018	93%	77%	60%
2019	94%	77%	65%
2020	90%	69%	63%

Pada tahun 2015-2019 tingkat kesempatan kerja mengalami kenaikan hingga 94%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat kesempatan kerja di Kota Malang mengalami penurunan menjadi 90%. Angka tersebut menggambarkan peluang seorang individu yang termasuk dalam angkatan kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, namun angka capaian tersebut masih terbilang besar sehingga kondisi ketenagakerjaan di Kota Malang masih dapat dikatakan baik.

Persentase penduduk bekerja penuh menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 Persentase penduduk bekerja penuh mengalami penurunan

yang cukup signifikan yaitu sebesar 4%. Pada tahun 2018 dan 2019 Persentase penduduk bekerja penuh ialah 77%. Sedangkan untuk tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 69%. Penurunan penduduk bekerja penuh ini salah satunya diakibatkan oleh adanya covid-19 dimana para pekerja banyak yang melakukan kebijakan *Work from Home* (WFH).

Penduduk berpendidikan di kota Malang mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 hingga 2018. Sedangkan penduduk berpendidikan meningkat secara signifikan pada tahun 2019 dengan Persentase sebesar 65%. Untuk tahun 2020 penduduk berpendidikan Kota Malang ialah 63%. Meskipun cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahun, namun Persentase tenaga kerja berpendidikan di Kota Malang masih tergolong cukup rendah.

c. Pengukuran Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Pengukuran infrastruktur ekonomi terdiri dari Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN dan Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang.

Tabel 4. Pengukuran infrastruktur ekonomi

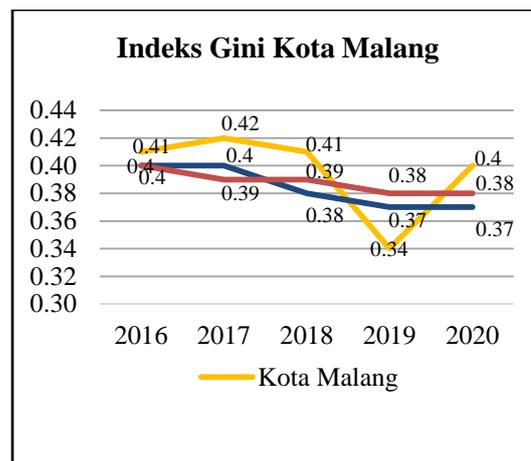
Tahun	Persentase rumah tangga pengguna listrik/PLN	Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang
2015	100%	5%
2016	100%	29%
2017	100%	131%
2018	100%	131%
2019	100%	131%
2020	100%	823%

Tingkat elektrifikasi ini menggambarkan perluasan akses dan manfaat ekonomi karena pembangunan ekonomi dimulai dengan ketersediaan infrastruktur listrik. Aktivitas ekonomi dapat berjalan cepat jika ketersediaan listrik sudah merata untuk semua masyarakat. Berdasarkan grafik dapat diketahui bahwa pengguna listrik/PLN di Kota Malang sudah tersebar merata hampir di seluruh wilayah Kota Malang dengan Persentase setiap tahun ialah 100% dari tahun 2015 hingga 2020.

Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang pada Kota Malang meningkat dari tahun ke tahun. Persentase tersebut meningkat secara signifikan pada tahun 2019 dengan Persentase sebesar 131% menjadi 823% pada tahun 2020. Hal ini dapat mendukung wilayah Kota dalam menciptakan kondisi jalan yang baik di terutama untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Malang.

d. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rasio pendapatan gini merupakan salah satu indikator dalam mengukur sub pilar ketimpangan pada pilar pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan untuk mengukur indeks pembangunan ekonomi. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna).



Gambar 3. Indeks Gini Kota Malang

Pada tahun 2019 indeks gini di Kota Malang lebih rendah dari Jawa Timur dan Indonesia yaitu sebesar 0,34. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 0,37 dan Indonesia 0,38. Sedangkan pada tahun 2020 indeks gini di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 0,4. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Jawa Timur sebesar 0,37 dan Indonesia sebesar 0,38. Indeks gini Kota Malang termasuk dalam ketimpangan sedang.

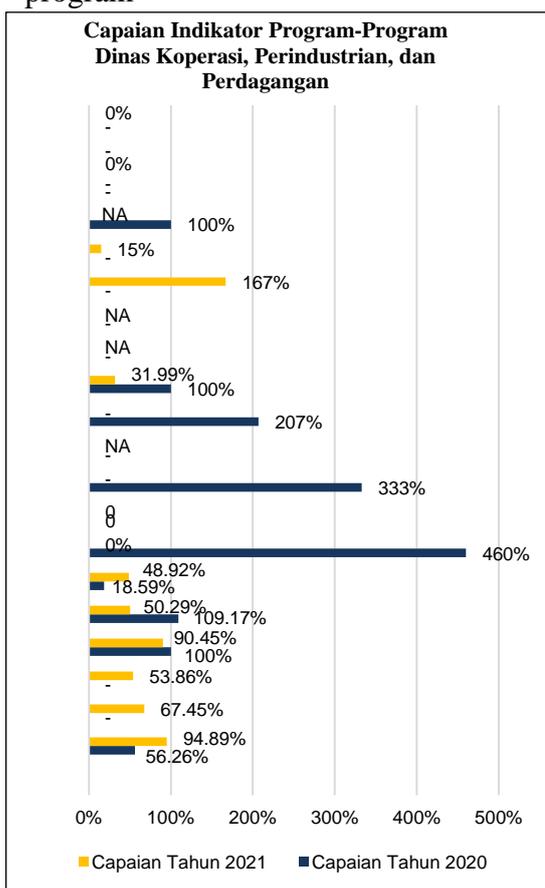
3. Evaluasi Target Capaian Urusan Kegiatan Bidang Ekonomi

Adanya perubahan RPJMD Kota Malang memberikan dampak bagi target-target yang ada pada setiap indikator program. Evaluasi target capaian urusan kegiatan bidang ekonomi mengacu pada misi kedua RPJMD yaitu mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan, dan keterpaduan. Dalam misi tersebut terdapat program-program dari berbagai urusan ekonomi yang akan menunjang terwujudnya misi ke 2 RPJMD Kota Malang yang berasal dari berbagai perangkat daerah yaitu: Dinas Keper mudaan, Olahraga dan Pariwisata; Dinas Perhubungan; Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas

Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan lima Kecamatan di Kota Malang.

a. Program-Program Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2021, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan memiliki tujuh belas program dan dua puluh indikator program



Gambar 4. Capaian Indikator Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

Capaian program pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah disesuaikan berdasarkan target pada Rancangan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020, terdapat tiga indikator program yang tidak mencapai target,

yaitu Persentase koperasi aktif, Persentase WUB mikro yang diberdayakan, dan Persentase peningkatan jumlah IKM. Untuk indikator Persentase penetapan pasar rakyat sebagai pasar halal tidak terealisasi sehingga memiliki capaian yang tidak sesuai dengan target. Sementara itu, untuk indikator lainnya telah sesuai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perubahan

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan capaian keseluruhan lebih dari 100%. Berikut merupakan efektifitas capaian pada setiap program.

Tabel 5. Efektifitas Capaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

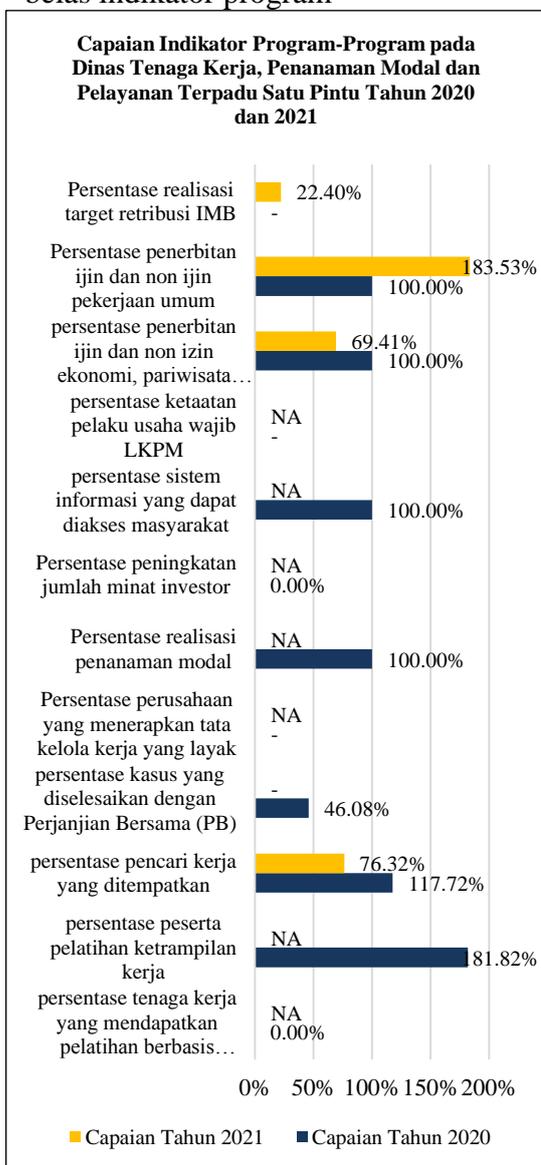
Efektifitas	
Capaian 2020	Indikator Program
Sangat Rendah	Persentase WUB Mikro yang diberdayakan
	Persentase penetapan pasar rakyat yang ber SNI
	Persentase peningkatan jumlah IKM
Rendah	Persentase koperasi aktif
Sangat Tinggi	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP
	Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Mikro yang naik menjadi usaha kecil
	Persentase Jumlah Alat UTTP yang di Tera dan Tera Ulang
	Persentase pengawasan rokok yang tidak dilekati pita cukai
	Persentase IHT yang dibina

Faktor-faktor yang paling mempengaruhi program yang memiliki nilai yang belum tercapai:

1. *refocusing* anggaran yaitu kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat usaha mikro;
2. belum ada sistem jaminan halal untuk pasar khususnya di Kota Malang, sehingga tidak bisa ditetapkan pasar halal.

b. Program-Program Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki delapan program dan dua belas indikator program



Gambar 5. Capaian Indikator Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Pedagangan

Pada tahun 2020, terdapat tiga indikator program yang tidak mencapai target, yaitu persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, persentase peningkatan jumlah minat investor, dan persentase

kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Untuk indikator persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan persentase peningkatan jumlah minat investor tidak terealisasi sehingga memiliki capaian yang tidak sesuai dengan target.

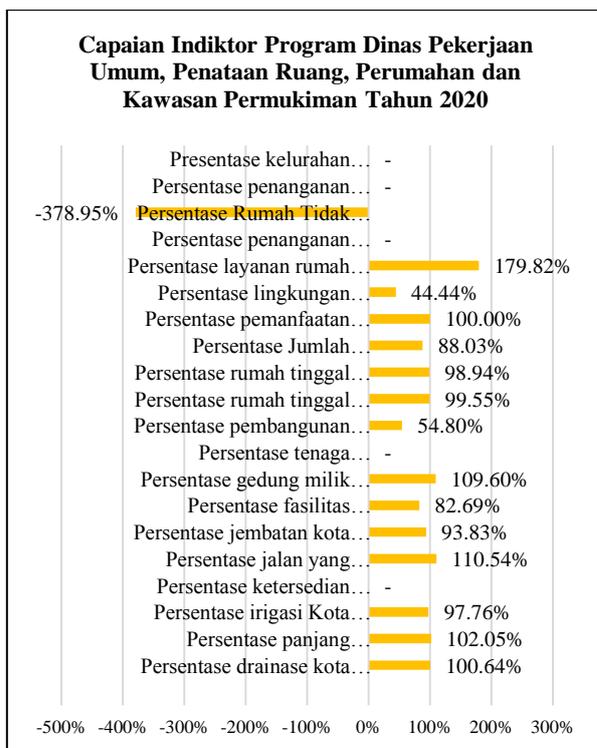
Sementara itu, untuk indikator lainnya telah sesuai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 dengan capaian keseluruhan lebih dari 100%.

Tabel 6. Efektifitas Capaian Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Efektifitas Capaian 2020	Indikator Program
Sangat Rendah	Persentase peningkatan jumlah minat investor
	persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
	persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
Sangat Tinggi	Persentase realisasi penanaman modal
	persentase sistem informasi yang dapat diakses masyarakat
	persentase penerbitan ijin dan non izin ekonomi, pariwisata dan sosial budaya
	Persentase penerbitan ijin dan non ijin pekerjaan umum
	persentase peserta pelatihan ketrampilan kerja
	persentase pencari kerja yang ditempatkan

c. Program-Program Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki lima belas program dan dua puluh indikator program.



Gambar 6. Capaian Indikator Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terdapat dua indikator program yang memiliki capaian jauh dari target yaitu persentase pembangunan kawasan prioritas sesuai RTBL dengan capaian 54,80% dan persentase lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan capaian 44,44%. Selain itu terdapat nilai capaian negatif yaitu -378,95% pada indikator persentase rumah tidak layak huni.

Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdapat sebesar 69% program yang memiliki efektifitas sangat tinggi, 13% tinggi, 12% rendah, dan 6% sangat rendah. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi program dengan capaian nilai yang belum tercapai diantaranya ialah:

1. *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan yang mendukung program;
2. Pembatasan kegiatan akibat PSBB covid-19;
3. belum lengkapnya data pendukung dalam proses serah terima PSU dari pengembang/warga kepada Pemerintah Kota Malang.

d. Program-Program pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata memiliki tujuh program dan sembilan indikator program.



Gambar 7. Capaian Indikator Program Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

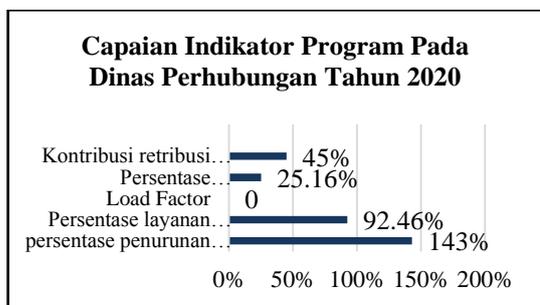
Pada tahun 2020, terdapat empat indikator program yang tidak mencapai target, yaitu persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan dengan capaian 51%, keikutsertaan masyarakat Kota Malang pada *event* olahraga dengan capaian 0% atau tidak terealisasi, persentase cabor berprestasi dengan capaian 0% atau tidak terealisasi, dan persentase pemasaran pariwisata dengan capaian 66,67%.

Tabel 7. Efektifitas Capaian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata

Efektifitas Program 2021	Indikator Program
Sangat Rendah	Persentase Keikutsertaan Masyarakat Kota Malang Pada Event Olahraga persentase cabor berprestasi
Rendah	Persentase pemuda Kota Malang yang mengikuti kegiatan kepemudaan
Sedang	Persentase pemasaran Pariwisata
Tinggi	Persentase pengembangan Ekonomi kreatif
Sangat tinggi	Pertumbuhan anggota pramuka Persentase destinasi wisata yang dibina Persentase industri pariwisata yang dibina Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif pada 7 subsektor yang mendapat pembekalan sertifikasi HKI

e. Program-Program Pada Dinas Perhubungan

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan memiliki satu program dan lima indikator program. Hal ini berbeda dari RPJMD sebelumnya dimana Dinas Perhubungan memiliki tiga program dan tiga indikator.



Gambar 8. Capaian Indikator Program Dinas Perhubungan

Indikator program kontribusi pelayanan parkir terhadap PAD dan indikator program persentase penurunan titik kemacetan memiliki capaian sesuai dengan target. Program-program urusan perhubungan pada tahun 2021 masih dalam proses pelaksanaan sehingga belum dapat diketahui capaian program pada tahun 2021.

Tabel 8. Efektifitas Capaian Dinas Perhubungan

Efektifitas Tahun 2020	Indikator Program
Sangat Rendah	Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat)
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
Sangat Tinggi	Persentase penurunan titik kemacetan
	Kontribusi retribusi pelayanan parkir terhadap PAD

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas capaian program pada Dinas Perhubungan:

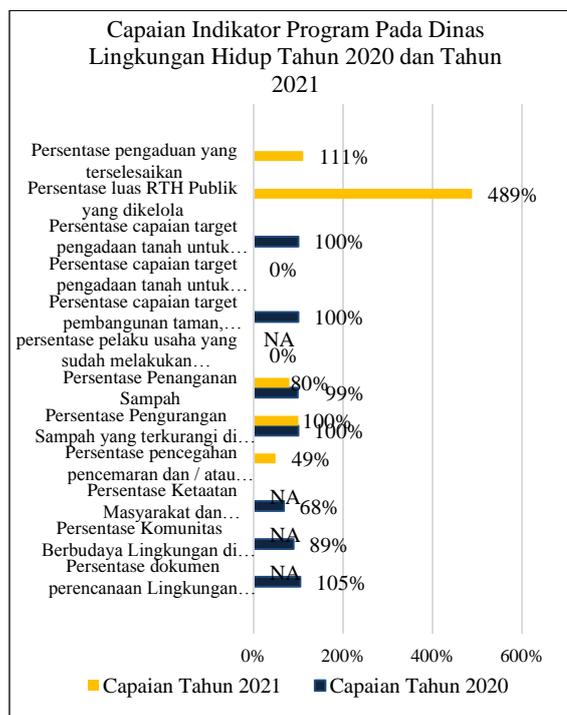
1. Adanya PSBB menyebabkan penurunan titik kemacetan di Kota Malang karena masyarakat memilih untuk tidak keluar rumah;

2. Pelayanan angkutan kota belum sesuai dengan standar pelayanan minimal;
3. Masih adanya titik parkir yang belum terdata sehingga belum masuk dalam retribusi parkir, kurangnya lahan parkir yang memadai sehingga mengganggu arus lalu lintas.

f. Program-Program pada Dinas Lingkungan Hidup

Pada Perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sepuluh program dan dua belas indikator program. Terdapat empat indikator program yang mengalami penyesuaian dan akan dilaksanakan pada tahun 2021, diantaranya yaitu:

1. Persentase pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Persentase pelaku usaha yang sudah melakukan pengelolaan limbah B3;
3. Persentase luas RTH publik yang dikelola;
4. Persentase pengaduan yang terselesaikan.



Gambar 9. Capaian Indikator Program Dinas Lingkungan Hidup

Pada tahun 2020, terdapat beberapa indikator program yang tidak sesuai dengan capaian diantaranya yaitu persentase komunitas berbudaya lingkungan kota malang dengan capaian 89%, persentase ketaatan masyarakat dan kegiatan/usaha pemilik izin lingkungan dengan capaian 68%, penanganan sampah dengan capaian 99%, dan persentase capaian target pengadaan tanah untuk taman, hutan kota, kebun bibit, dan jalur hijau dengan capaian 0% atau tidak terealisasi.

Tabel 9. Efektifitas Capaian Dinas Lingkungan Hidup

Efektifitas Tahun 2020	Indikator Program
Sangat Rendah	Persentase capaian target pengadaan tanah untuk taman, hutan kota, kebun bibit, dan jalur hijau
Sedang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan Kegiatan/Usaha Pemilik Izin Lingkungan
Tinggi	Persentase Komunitas Berbudaya Lingkungan di Kota Malang
Sangat Tinggi	Persentase dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang tersusun dan sesuai standar
	Persentase pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
	Persentase Pengurangan Sampah yang berkurang di masyarakat dan Sektor Informal (Merupakan nilai kumulatif Persentase Penanganan Sampah
	Persentase capaian target pembangunan taman, hutan kota, kebun bibit, dan jalur hijau
	Persentase capaian target pengadaan tanah untuk taman, hutan kota, kebun bibit, dan jalur hijau

g. Program-Pogram di Kecamatan di Kota Malang

Program-program Kecamatan di kota Malang yaitu Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Lowokwaru. Pada Kecamatan terdapat tiga program dan tiga indikator program.

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum

3. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

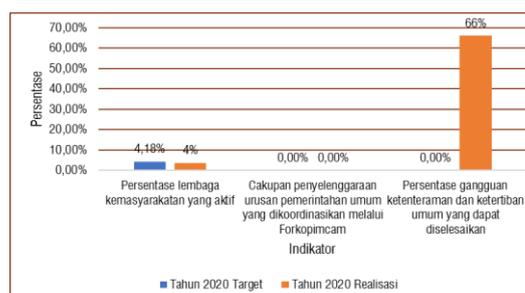
Capaian indikator program setiap Kecamatan adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Capaian Indikator Program Kecamatan Klojen



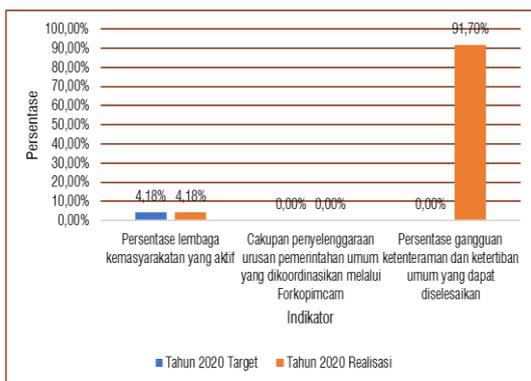
Gambar 11. Capaian Indikator Program Kecamatan Lowokwaru



Gambar 12. Capaian Indikator Program Kecamatan Blimbing



Gambar 13. Capaian Indikator Program Kecamatan Kedungkandang



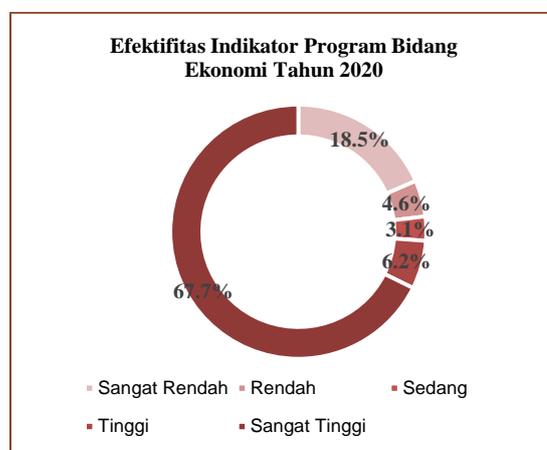
Gambar 14. Capaian Indikator Program Kecamatan Sukoharjo

KESIMPULAN

1. Pertumbuhan PDRB per kapita Kota Malang mengalami menurun menjadi -8%, dipengaruhi laju pertumbuhan Kota Malang yang saat ini turun menjadi -2,26. *Share* manufaktur Kota Malang mengalami kenaikan menjadi 26,88% dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB Nominal 9,4%.
2. Tingkat kesempatan kerja Kota Malang 90%. Angka tersebut masih terbilang tinggi, yang artinya angkatan kerja yang telah terserap ke pasar kerja sebesar 90%. Persentase penduduk bekerja penuh mengalami penurunan menjadi 69% pada tahun 2020. Tenaga berpendidikan Kota Malang ialah 38%. Angka tersebut masih tergolong rendah dan berpengaruh pada rendahnya kualitas tenaga kerja yang ada di Malang
3. Pengguna listrik/PLN di Kota Malang sudah tersebar merata hampir di seluruh wilayah Kota Malang. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik/PLN menurun pada tahun 2020 menjadi 101%.. Persentase jalan dengan kondisi baik dan sedang menurun pada tahun 2020 sebesar 55%. Hal ini perlu menjadi perhatian wilayah Kota Malang dengan melakukan perbaikan jalan secara rutin untuk

mendukung terciptanya kondisi jalan yang baik di Kota Malang.

4. Indeks gini Kota Malang termasuk dalam ketimpangan sedang. Pada tahun 2020 indeks gini di Kota Malang mengalami peningkatan menjadi 0,4. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan indeks gini Jawa Timur sebesar 0,37 dan Indonesia sebesar 0,38
5. Pada tahun 2020, terdapat 67% indikator program yang telah dilaksanakan dengan tingkat efektivitas sangat tinggi oleh Perangkat Daerah masing-masing. Indikator tersebut telah diwujudkan dengan berbagai kegiatan dan realisasi yang telah melebihi target.



Gambar 15. Efektifitas Indikator Program Ekonomi Kota Malang

REKOMENDASI

1. Adanya perubahan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang telah dilakukan agar segera ditindaklanjuti terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah, sehingga diharapkan dengan adanya perubahan tersebut dapat melampaui capaian program pada bidang pembangunan ekonomi.
2. Berdasarkan hasil capaian pada masing-masing program ekonomi,

maka dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Apabila capaian program memiliki efektifitas capaian tinggi dan sangat tinggi maka perlunya mempertahankan hasil yang telah di capai pada tahun-tahun selanjutnya
 - b. Apabila capaian program memiliki efektifitas sangat rendah, rendah, dan sedang perlu adanya monitoring dan evaluasi capaian indikator program pembangunan ekonomi secara berkala agar keberhasilan capaian program pada setiap tahu dapat tercapai dengan maksimal.
3. Dalam rangka percepatan *recovery* perekonomian Kota Malang, maka pencapaian program dapat difokuskan terlebih dahulu pada sektor unggulan dan potensial yang dapat mendorong revitalisasi pendapatan asli daerah, khususnya industri pengolahan, jasa, pariwisata, industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
 4. Peningkatan kompetensi SDM perencana di masing-masing PD melalui pelatihan perencanaan dan penganggaran untuk mendukung ketercapaian program pada setiap perangkat daerah.
 5. Pemerataan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung aktivitas perekonomian Kota Malang.
 6. Memanfaatkan potensi dan sumberdaya lokal unggulan Kota Malang dalam mendorong pergerakan perekonomian Kota Malang.
 7. Memperkuat sumber daya manusia terutama dari segi pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menciptakan peningkatan taraf hidup masyarakat.
 8. Saran kebijakan pada setiap urusan Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 10. Saran Kebijakan Pemangku Urusan Ekonomi

Urusan Ekonomi	Saran Kebijakan
Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimal dana pelaksanaan setiap indikator program - Penambahan alokasi anggaran melalui APBN guna melaksanakan program prioritas koperasi perindustrian dan perdagangan - Pemantauan ketersediaan barang pokok di Kota Malang - Membuat sistem pasar halal - Meningkatkan kualitas pasar dengan revitalisasi pasar dan sertifikasi SNI pada pasar rakyat
Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Terpadu Satu Pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan dana dan atau penambahan alokasi anggaran untuk program prioritas Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dapat menstimulus perekonomian daerah Kota Malang - Memperkuat serta melakukan pengembangan pada image maketing, attraction marketing, infrastucture marketing, dan people marketing berdasarkan potensi asli yang terdapat di Kota Malang guna menarik investor - Mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mempromosikan Kota Malang
Urusan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pelaksanaan kegiatan yang menyesuaikan dengan protocol kesehatan covid-19
UrusanPerhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Menindak secara tegas adanya sanksi retribusi pelayanan parkir Kota Malang - Sosialisasi pentingnya kepemilikan KIR untuk angkutan umum
urusan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi dan serta memudahkan layanan administrasi perizinan untuk kepemilikan izin lingkungan - Sosialisasi berkala terkait pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan - Melakukan kegiatan wajib gotong royong secara rutin untuk membersihkan lingkungan sekitar dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Urusan Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Bentuk kerjasama dengan pengembang dalam melengkapi data pendukung proses serah terima PSU - Peningkatan Kerjasama dengan berbagai pihak sepeerti pengembang perumahan, perusahaan filantropi, dan peningkatan swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik yang berkualitas khususnya Ruang Terbuka Hijau, drainase, dan sanitas
Urusan Setiap Kecamatan di Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan SDM guna meningkatkan layanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kota Malang dalam Angka Tahun 2021*. Kota Malang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestic Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kota Malang*. Kota Malang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestic Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Malang*. Kota Malang: Badan Pusat Statistik.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif*. inklusif.bappenas.go.id. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (bappenas.go.id) (Diakses pada 24 Juni 2021)
- Darmasto, B. *et al.* (2013). *Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard* (Studi pada PT XL Axiata Tbk ± Jakarta). *Jurnal SOROT IX* (1): 1-12.
- Irwanto. (2006). *Focus Group Discussion*. Pustaka Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyani, Endang *et al.* (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Pemerintah Kota Malang. (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2025*. Malang: Pemerintah Kota Malang.
- Pemerintah Kota Malang. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023*. Malang: Pemerintah Kota Malang.